



## Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah dengan Pengawasan dan Pengendalian Sebagai Variabel Mediasi pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Arifin<sup>1</sup>, M.E.Perseveranda<sup>2</sup>, Simon Sia Niha<sup>3</sup>, Heny Manafe<sup>4</sup>, Rere Paulina Bibiana<sup>5</sup>, Stanis Man<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia, [arifin1muhtar2@gmail.com](mailto:arifin1muhtar2@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia

<sup>4</sup> Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia

<sup>5</sup> Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia

<sup>6</sup> Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia

Corresponding Author: [arifin1muhtar2@gmail.com](mailto:arifin1muhtar2@gmail.com)

**Abstract:** *This study aims to find out: 1) An overview of the level of asset inventory, legal audit, asset valuation, asset monitoring and control, and optimization of asset management in the Provincial Government of East Nusa Tenggara. 2) the significance of the influence of asset inventory, legal audit, and asset valuation, on asset monitoring and control. 3) the significance of the influence of asset inventory, legal audit, asset valuation, and asset monitoring and control on the optimization of asset management. 4) the significance of the influence of asset monitoring and control in mediating the effect of asset inventory, legal audit, and asset valuation on optimizing asset management in the Regional Government of East Nusa Tenggara Province. The collected data were analyzed using descriptive statistics and inferential statistics by applying Smart PLS. The results of the descriptive statistical analysis show that asset inventory is in the good enough category, a legal audit is in a good category, asset valuation is in the good enough category, asset monitoring and control is in the good enough category, optimization of asset management is in a good category. The results of the inferential statistical analysis show that asset inventory has a significant effect on asset supervision and control legal audit has a significant effect on asset supervision and control, asset valuation asset supervision and control, and Asset Monitoring and Control can Mediate the Effect of Asset Inventory, Legal Audit and Asset Valuation on Optimizing Asset Utilization.*

**Keyword:** *Asset Inventory, Legal Audit, Asset Valuation, Asset Control, Optimization of Asset Management.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Gambaran mengenai tingkat inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, pengawasan dan pengendalian aset, dan optimalisasi pengelolaan aset pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2) signifikansi pengaruh inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, terhadap pengawasan dan pengendalian aset. 3) signifikansi pengaruh inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset dan pengawasan dan pengendalian aset terhadap optimalisasi pengelolaan aset. 4) signifikansi pengaruh pengawasan dan pengendalian aset dalam memediasi pengaruh inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset terhadap optimalisasi pengelolaan aset pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial dengan menerapkan Smart PLS. Hasil Analisis statistik Deskriptif menunjukkan bahwa inventarisasi aset berada dalam kategori cukup baik, legal audit berada dalam kategori baik, penilaian aset dalam kategori cukup baik, pengawasan dan pengendalian aset kategori cukup baik, optimalisasi pengelolaan aset berada dalam kategori baik. Hasil analisis statistik Inferensial menunjukkan bahwa inventarisasi aset berpengaruh signifikan terhadap pengawasan dan pengendalian aset legal audit berpengaruh signifikan terhadap pengawasan dan pengendalian aset, penilaian aset pengawasan dan pengendalian aset, Pengawasan dan Pengendalian Aset dapat Memediasi Pengaruh Inventarisasi Aset, Legal Audit dan Penilaian Aset terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset.

**Kata Kunci:** Inventarisasi Aset, Legal Audit, Penilaian Aset, Pengendalian Aset, Optimalisasi Pengelolaan Aset.

---

## PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal di Indonesia telah dilaksanakan lebih dari satu dekade dengan memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan fiskalnya terutama dalam pengalokasian sumber-sumber pendapatan potensial dan penggunaan belanja produktif yang dapat mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat (Christia & Ispriyarso, 2019). Sumber-sumber pendapatan dan belanja daerah yang digunakan dengan baik akan nampak dalam pengelolaan keuangannya. Salah satu bentuk pencapaian pengelolaan keuangan daerah adalah pemanfaatan kekayaan atau aset milik daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam mencapai visi dan misi daerah.

Pemanfaatan aset milik daerah dapat dilakukan melalui kebijakan manajemen aset daerah untuk mencapai pengelolaan yang optimal (Hartati et al., 2019). Manajemen aset dapat mendorong pemulihan ekonomi daerah maupun nasional karena mampu berperan sebagai alat kebijakan fiskal daerah apabila pengelolaannya mencapai titik optimal oleh pemerintah daerah. Peran aset daerah yang besar dalam mendorong pemulihan ekonomi dapat menciptakan keseimbangan fiskal daerah melalui pemanfaatannya untuk menggali potensi ekonomi lokal yang dapat mengurangi tingkat ketergantungan fiskal kepada pemerintah pusat melalui dana transfer (Fanggidae & Manafe, 2019).

Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa aset tetap adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset Pemerintah diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan aset non lancar, aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang serta persediaan, adapun aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

Peraturan pemerintah tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah dan Pusat berusaha untuk melakukan optimalisasi aset melalui mekanisme manajemen yang sesuai dengan regulasi-regulasi yang telah ditetapkan untuk mendukung tujuan. Regulasi-regulasi dimaksud adalah Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara Daerah. Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, telah membawa perubahan paradigma baru dalam manajemen barang milik daerah yang efektif, efisien dan ekonomis yang untuk mencapai pengelolaan aset daerah yang optimal.

Manajemen aset daerah adalah upaya untuk memandu pengelolaan kekayaan yang mencakup proses perencanaan kebutuhan aset, mendapatkan, inventarisasi, legal audit, menilai, mengoperasikan, memelihara, membaharukan atau menghapuskan, hingga mengalihkan aset secara efektif dan efisien. Dengan adanya manajemen aset diharapkan dapat mendorong tercapainya optimalisasi aset tetap tanah menjadi lebih efektif dan efisien dalam rangka menunjang tugas dan fungsi pemerintah daerah (Purba, 2019).

Namun, sistem manajemen aset dinilai belum memberikan dampak kemajuan bagi peningkatan pelayanan di lingkungan kerja pemerintah daerah masing-masing dan manajemen aset selama ini masih kurang diperhatikan dalam birokrasi pemerintah daerah (Wicaksana et al., 2021). Untuk melakukan optimalisasi aset harus dilakukan inventarisasi, penilaian serta pengkajian terhadap potensi aset yang ada dengan menghimpun semua jenis aset, baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak. Inventarisasi dilakukan untuk mengetahui asal usul serta informasi yang berkaitan dengan aset mencakup luas, volume, spesifikasi, jenis, merk, dan harga perolehan dari aset (Asman et al., 2016).

Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami permasalahan tentang manajemen aset daerah. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi adalah perawatan aset daerah dan inventarisasi aset berdasarkan opini Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 permasalahan yang terjadi adalah pada aspek tanah, penatausahaan aset tetap, Kesalahan Penganggaran dan Pengakuan Belanja, dan aset tetap.

Lebih lengkap diuraikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1. Opini BPK provinsi NTT**

<b>Aspek</b>	<b>Permasalahan</b>
Tanah	Pengakuan Penyertaan Modal Berupa Tanah Pemerintah Provinsi NTT pada PT. Semen Kupang belum ditetapkan melalui Peraturan Daerah;
Penatausahaan Aset Tetap	Penatausahaan Aset Tetap pada beberapa OPD masih belum tertib, antara lain: Pengamanan Aset Tetap Tanah belum memadai dimana terdapat pembangunan jalan senilai Rp7,3M pada tanah hibah masyarakat yang belum dilengkapi dengan Nota Hibah; Pemanfaatan BMD belum sesuai ketentuan; dan Terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang belum jelas kelanjutannya.
Kesalahan Penganggaran dan Pengakuan Belanja	Kesalahan Penganggaran dan Pengakuan Belanja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019 Tidak Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, berupa ketidaksesuaian atas Belanja Barang yang dianggarkan ke Belanja Modal dan sebaliknya.
Aset Tetap	Belum semua Aset Tetap tercatat dalam daftar Aset Tetap dan belum memiliki harga perolehan yang dianggap wajar. Pencatatan Aset Tetap belum sesuai kelompok dan belum terinci per unit. Keberadaan dan kondisi Aset Tetap masih diragukan. Kesulitan menentukan umur manfaat.

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa, Pelaksanaan manajemen aset tetap pada Pemerintah Provinsi NTT masih jauh dari regulasi yang ditetapkan. Pada prinsipnya aset tetap harus dicatat per unit, mengingat setiap unit memiliki keunikan, karakteristik dan kondisi yang berbeda satu sama lain meskipun diperoleh pada saat yang sama. Keberadaan bukti perolehan sangat penting untuk mencatat aset tetap pada satuan kerja pemerintah. Sementara itu, masih banyak dijumpai dropping barang dari unit kerja atasan yang tidak dilengkapi dengan dokumen tersebut, sehingga menyulitkan pencatatan dan pengakuan nilai aset tetap. Pada satuan kerja yang melakukan pencatatan aset tersebut biasanya diberi nilai Rp1,00/unit yang secara otomatis tidak dapat dilakukan penyusutan meskipun barang tersebut dalam kondisi baik dan dioperasikan. Daftar Aset Tetap pada satuan kerja yang seharusnya mencerminkan keberadaan dan kondisi aset pada satuan kerja menjadi informasi yang sering diragukan, karena banyak yang tidak diperbaharui kondisinya. Selain itu, ada aset tetap yang telah berpindah ke satuan kerja lain tetapi masih tercatat di satuan kerja yang lama. Untuk perpindahan aset tetap antar satuan kerja tidak segera ditindaklanjuti dengan dokumen penetapan status penggunaan aset kepada satuan kerja tujuan.

Permasalahan terkait mengenai aset dan optimalisasi pengelolaan aset pada Pemerintah Provinsi NTT di atas, terlihat bahwa Pemerintah belum secara baik melaksanakan manajemen aset daerah melalui inventaris aset, legal audit, penilaian aset, pengendalian dan pengawasan aset yang telah ditetapkan melalui regulasi pemerintah melalui Lembaga Administrasi Negara tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah, dan Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Manajemen aset daerah yang tidak dilaksanakan sesuai dengan regulasi akan berdampak terhadap optimalisasi dan keefektifan pengelolaan aset daerah.

Berdasarkan permasalahan empiris pada Pemerintah Provinsi NTT dan hasil-hasil penelitian sebelumnya, maka penelitian ini akan menguji pengaruh antara manajemen aset, melalui variabel Inventarisasi aset, Legal audit, Penilaian aset dan Pengawasan dan pengendalian aset terhadap Optimalisasi pengelolaan aset daerah pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi NTT yang sejalan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini kemudian menempatkan variabel Pengawasan dan pengendalian aset sebagai variabel mediasi. Penggunaan variabel mediasi dilakukan berdasarkan gap teoritis pada penelitian sebelumnya, yaitu Wicaksana et al. (2021) yang menunjukkan bahwa variabel pengawasan dan pengendalian tidak berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap optimalisasi aset apabila dimediasi oleh variabel lain. Penelitian ini sejalan dengan Asman et al. (2016). Meskipun penelitian lain menunjukkan pengaruh langsung (Hartati et al., 2019; Nursalim, 2018; R. Widyanti, 2018).

Penggunaan variabel mediasi dalam penelitian ini juga mengisi gap empiris yang terjadi pada Pemerintah Provinsi NTT, yaitu berdasarkan opini BPK yang menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan dan pengendalian internal manajemen aset daerah.

## **METODE**

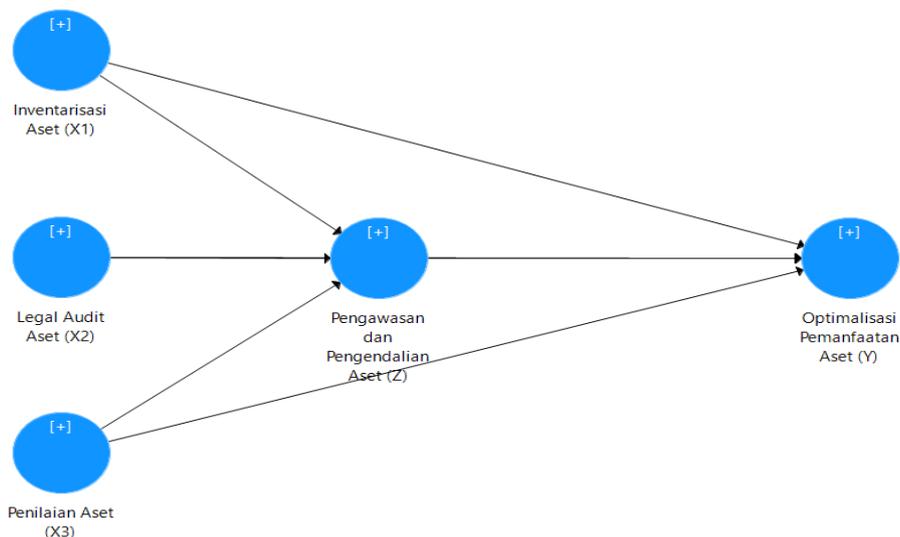
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dilakukan pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada semua Dinas, Badan dan Kantor berjumlah 38 OPD. Penelitian dilakukan selama delapan bulan Februari hingga september 2022, dimana dalam penelitian meliputi kegiatan rencana persiapan penelitian yang dilakukan pada bulan pertama, kemudian diteruskan pada pelaksanaan penelitian dan pelaporan.

Variabel bebas penelitian ini yaitu variabel yang dapat mengalami perubahan dalam hal ini bisa berupa kenaikan atau penurunan (variabel X). Variabel Independen dalam

penelitian ini adalah inventarisasi aset (X1), legal audit (X2), penilaian Aset (X3) pengawasan dan pengendalian aset (X4), sedangkan variabel terikat yaitu variabel yang tidak dapat mengalami perubahan walaupun dalam kurun waktu tertentu (variabel Y). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah optimalisasi pengelolaan aset (Y).

Populasi dalam penelitian ini semua aparatur sipil negara yang terlibat dan atau melaksanakan Penatausahaan Pengguna Barang/Pengurus Barang pada 38 OPD di lingkup Pemerintah Provinsi NTT. OPD di lingkup Pemerintah Provinsi NTT melakukan pengelolaan barang/aset miliki daerah. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner/angket, data hasil penelitian diolah dengan analisis statistik deskriptif, statistik inferensial dengan menggunakan teknik analisis SEM (*Structural Equation Modeling*) dengan PLS (Partial Least Square), yang dioperasikan melalui program Smart PLS versi 3.0 yang mencakup komponen Inner Model dan autor model. Sedangkan pengujian hipotesis dilakukan uji t.

Berdasarkan masalah yang dihadapi dan landasan dasar teori yang ada dan untuk memudahkan kegiatan penelitian maka penelitian ini mengembangkan kerangka konsep dan kerangka pemikiran seperti berikut ini.



Gambar 1. Krangka pemikiran

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Provinsi NTT beribukota di Kupang dengan letak Geografis Terletak pada 80-120 LS dan 1180– 1250 BT; wilayah daratan seluas 47.350 Km<sup>2</sup> dengan garis pantai sepanjang 5.700 Km<sup>2</sup>; Batas Wilayah Utara berbatasan dengan Laut Flores, Timur berbatasan dengan Republik Demokratik Timor Leste dan Kepulauan, Barat berbatasan dengan Kab. Rote Ndao dan Laut Sawu, dan Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; Jumlah penduduk 4.448.873 orang (NTT dalam angka Tahun 2008); Wilayah NTT memiliki jalan sepanjang 17.069,60 km, terdiri dari jalan negara/pusat sepanjang 2.464,32 km, jalan Provinsi 1.738,81 km, dan sisanya sepanjang 12.866,81 menjadi wewenang kabupaten.

Hasil penelitian menunjukkan responden dengan karakteristik usia dan jenis kelamin, proporsi responden berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh pria sebanyak 99 (55,62%), dan perempuan sebanyak 79 (44,38%). Responden berdasarkan usia usia dari 25-30 tahun sebanyak 7 orang atau 3.93%, usia 31-35 tahun sebanyak 44 orang atau 24.72%, usia 36-40 tahun sebanyak 78 atau sebesar 43.82%, usia 41-45 tahun sebanyak 46 orang atau 25.84% dan usia lebih dari 46-50 tahun sebanyak 3 orang atau 1.69%. Responden dengan pendidikan terakhir pendidikan terakhir SMA/SMK sebanyak 2 orang atau 1.12%, Sarjana (S1) sebanyak 172 orang atau 96.63%, magister (S2) sebanyak 4 orang atau 2.25% dan tidak ada responden

dengan tingkat pendidikan ariab (S3). Data responden menunjukkan bahwa dalam penelitian ini dominan dengan responden dengan tingkat pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 172 orang atau 96.63%. Responden berdasarkan lama bekerja responden yang dominan berada pada rentan 11-20 tahun bekerja dengan persentase 44.94%.

Hasil pengolahan data untuk masing-masing variabel secara deskriptif diperoleh hasil bahwa optimalisasi aset, inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, serta pengawasan dan pengendalian di lingkup pemerintahan provinsi NTT berada pada kategori baik, valid dan reliabel.

Dalam penelitian ini terdapat 5 variabel yang akan dideskripsikan yaitu 3 variabel bebas yaitu: inventarisasi aset (X1), legal audit (X2), penilaian aset (X3) 1 variabel mediasi yakni pengwasan dan pengendalian aset (Z) dan 1 variabel terikat yaitu optimalisasi pengendalian aset (Y). Tanggapan responden terhadap setiap variabel dan indikatornya dapat dilihat pada table-table dibawah ini.

**Tabel. 2 Tanggapan Responden Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset**

Indikator	$\Sigma$	$\bar{X}_{ps-p}$	$Ps-p/5 \times 100$	Ps-p	Kategori
Efisiensi	704	3,95	0,79	79	Baik
Efisiensi	661	3,71	0,74	74	Baik
Rata – Rata				76,5	Baik

Berdasarkan tanggapan responden, diketahui bahwa rata-rata skor yang dicapai oleh variabel optimalisasi pemanfaatan aset adalah 76,5 %. Indikator dengan skor tertinggi adalah Efisiensi dengan skor 79 % dan berada pada kategori Baik. Indikator dengan nilai terendah adalah efektivitas dengan kategori Baik.

**Tabel 3. Tanggapan Responden Terhadap Inventarisasi Aset**

Indikator	$\Sigma$	$\bar{X}_{ps-p}$	$Ps-p/5 \times 100$	Ps-p/5×100	Kategori
Pendataan	661	3,71	0,74	74	Baik
Pencatatan	673	3,78	0,76	76	Baik
Pelaporan	636	3,57	0,71	71	Baik
Rata – Rata				73,66	Baik

Hasil persepsi responden terhadap variabel Inventarisasi Aset mendapat skor rata-rata sebesar 73,66 %. Indikator dengan skor tertinggi adalah Pencatatan yaitu 76 dan indikator dengan skor terendah adalah Pelaporan sebesar 71.

**Tabel 4. Tanggapan Responden Terhadap Legal Audit Aset**

Indikator	$\Sigma$	$\bar{X}_{ps-p}$	$Ps-p/5 \times 100$	Ps-p/5×100	Kategori
Pengamanan fisik	612	3,44	0,68	68	Baik
Penagamanan administrasi	646	3,63	0,72	73	Baik
Rata – Rata				70,5	Baik

Skor rata-rata tanggapan responden terhadap variabel Legal Audit Aset sebesar 70,5 %. Indikator dengan skor tertinggi adalah pengamanan administrasi sebesar 73 % an indicator dengan skor terendah adalah pengamanan fisik 68 %.

**Tabel 5. Tanggapan Responden Terhadap Penilaian Aset**

Indikator	$\Sigma$	$\bar{X}_{ps-p}$	$Ps-p/5 \times 100$	Ps-p/5×100	Kategori
Nilai ekonomis	625	3,51	0,70	70	Baik
Estimasi nilai suatu aset	597	3,35	0,67	67	Cukup Baik
Rata – Rata				68,5	Baik

Tanggapan responden terhadap Penilaian aset mendapat skor rata-rata 68,5 %. Indikator Nilai ekonomis mendapat skor tertinggi 70. Indikator dengan nilai terendah adalah Estimasi nilai suat aset dengan skor 67 berada pada kategori cukup baik.

**Tabel 6. Tanggapan Responden Terhadap Pengawasan dan Pengendalian**

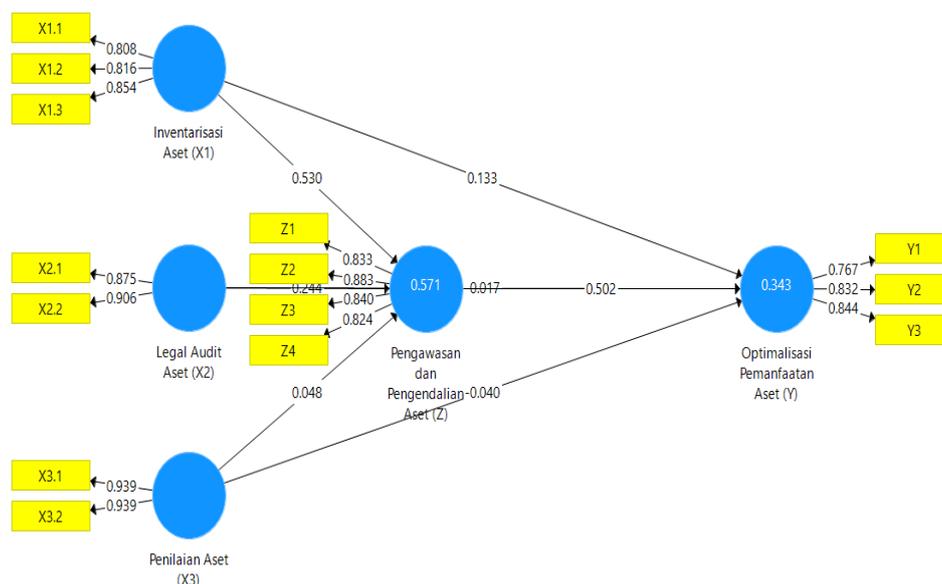
Indikator	$\Sigma$	$\bar{X}_{ps-p}$	$Ps-p/5 \times 100$	Ps-p/5×100	Kategori
Hasil sesuai rencana	679	3,81	0,76	76	Baik
Hasil yang dikehendaki	663	3,72	0,74	74	Baik
Hasil sesuai ketentuan dan kebijakan	651	3,65	0,73	73	Baik

Pelaksanaan berjalan sesuai rencana dan tujuan	658	3,69	0,74	74	Baik
Rata – Rata				74,25	Baik

Berdasarkan hasil analisis persepsi responden pada Tabel 4.10, maka dapat dijelaskan bahwa Tanggapan responden terhadap Pengawasan dan Pengendalian Aset mendapat skor rata-rata 74,25 %. Skor tertinggi adalah indikator Hasil sesuai rencana sebesar 76 %. Sebaliknya indikator dengan skor terendah adalah Hasil sesuai ketentuan dan kebijakan, dengan skor 73 % berada pada kategori Baik.

Hasil analisis statistik inferensial dengan menggunakan SEM *Partial Least Square* (PLS). Dalam analisis dengan menggunakan SEM Partial Least Square akan melali dua (2) kali evaluasi, yaitu pertama Evaluasi outer model yaitu melakukan evaluasi terhadap model pengukuran outer (model bagian luar) untuk menilai validitas dan reliabilitas model. Ukuran ini terdiri dari Validitas Konvergen, Validitas Diskriminan, *Composite Reliability dan Cronbach's Alpha*.

Validitas konvergen bertujuan untuk mengetahui hubungan antara setiap indicator dengan variable latennya valid atau tidak. Validitas konvergen dari model reflektif indikator dinilai berdasarkan korelasi antar skor item (*component score*) dengan skor variable laten atau (*construct score*). Validitas konvergen dari model indikator reflektif dapat dilihat dari nilai loading factor untuk setiap indikator konstruk, dimana korelasi antara item score/indikator dengan skor konstraknya dianggap valid jika memiliki nilai korelasi (loading factor) di atas 0,70 untuk penelitian yang bersifat confirmatory (Nunnally, 1978). Namun untuk penelitian yang bersifat exploratory nilai loading ariab atau korelasi antara 0,6 – 0,7 dapat diterima (Hair dkk: 1978). Untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran, dimana instrument baru yang belum teruji nilai loading 0,5 dianggap cukup memadai (Fornell dan Larcker, 1981). Dalam penelitian ini digunakan batas loading factor sebesar 0,60 ke atas.



**Gambar 2.** hasil pengujian author model

Pengujian inner model atau model pengukuran bagian dalam adalah untuk melihat hubungan antara variabel, nilai koefisien parameter, dan R-square dari model penelitian. Model ini akan dievaluasi dengan melihat R-square untuk konstruk dependen, uji t, serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural.

Dalam penelitian ini model hubungan yang dianalisis adalah hubungan yang bersifat reflektif dan gambar berikut merupakan hasil pengujian Model Struktural dengan hubungan

reflektif. Model Struktural dievaluasi dengan melihat R-square untuk konstruk dependen, uji t, serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural.

R-square sering disebut juga dengan koefisien determinan, yaitu mengukur kebaikan suai (goodness of fit) dari persamaan regresi yakni memberikan proporsi atau persentasi variasi total dalam variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel bebas. Nilai R<sup>2</sup> terletak antara 0 – 1 dan kecocokan model dikatakan lebih baik kalau R<sup>2</sup> semakin mendekati 1.

Adapun nilai R<sup>2</sup> dapat dilihat pada table berikut:

	R Square	R Square Adjusted
Optimalisasi Pemanfaatan Aset (Y)	0.343	0.327
Pengawasan dan Pengendalian Aset (Z)	0.571	0.564

Berdasarkan Tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa: (1) Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) optimalisasi pemanfaatan aset dan indikator-indikatornya adalah 0,32 menjelaskan bahwa variasi naik-turunnya optimalisasi pemanfaatan aset dipengaruhi oleh variasi naik-turunnya variabel inventarisasi aset dan indikator-indikatornya, variabel Legal audit aset dan indikator-indikatornya, dan pengawasan penilaian aset dengan indikator-indikatornya dan Pengawasan pengendalian aset. Atau dapat dijelaskan bahwa Koefisien tersebut mempunyai makna besarnya pengaruh keempat variabel laten exogenous bersama indikator-indikatornya terhadap variabel laten endogenous optimalisasi pemanfaatan aset dengan indikator-indikatornya sebesar 0,32 atau sebesar 32 % sedangkan sisanya 68 % dijelaskan oleh variabel lain; (2) 2. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) Pengawasan dan pengendalian aset beserta indikator-indikatornya sebesar 0,56 menjelaskan bahwa variasi naik-turunnya Pengawasan dan pengendalian aset disebabkan oleh variasi naik-turunnya variabel Inventarisasi aset dengan indikator-indikatornya, variabel Legal audit aset dan indikator-indikatornya dan Penilaian aset dengan indikator-indikatornya Koefisien tersebut mempunyai makna besarnya pengaruh keempat variabel laten exogenous bersama indikator-indikatornya terhadap variabel laten endogenous (Optimalisasi pemanfaatan aset) dengan indikator-indikatornya sebesar 0,56 atau sebesar 56 % sedangkan sisanya sebesar 44 % dijelaskan oleh variabel lain.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 2 diperoleh nilai koefisien yang signifikan yaitu Nilai probabilitas sebesar 0,002. Lebih kecil dari nilai alfa 0,05. Dengan demikian hipotesis dua yang menyatakan Inventarisasi Aset (X1) berpengaruh signifikan terhadap Optimalisasi pemanfaatan aset (Y) terbukti kebenarannya atau diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi NTT telah melakukan inventarisasi aset tetap secara rinci dan dilengkapi dengan identitas setiap aset serta inventarisasi dilakukan secara periodik 5 (lima) tahun sekali dan melakukan perubahan data apabila terjadi perubahan. Sehingga semakin baik pelaksanaan inventarisasi aset maka pemanfaatan juga akan semakin optimal.

Temuan penelitian ini didukung oleh teori Siregar (2018: 518) yang mengatakan bahwa tahapan manajemen aset daerah yaitu mulai inventarisasi aset, yang terdiri atas dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain.

1. Legal Audit Aset (X2) berpengaruh signifikan terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset (Y)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 3 terlihat nilai koefisien yang tidak signifikan karena nilai probabilitas sebesar 0,482. Lebih besar dari nilai alfa 0,05. Dengan demikian hipotesis tiga yang menyatakan Legal audit aset (X2) berpengaruh signifikan terhadap Optimalisasi pemanfaatan aset (Y) tidak terbukti kebenarannya atau ditolak.

Legal Audit aset sangat penting diperhatikan oleh perusahaan, karena dengan aset yang legal, akan memiliki status kepemilikan yang jelas dan secara langsung akan memberikan kepastian hukum atas aset tersebut. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari sengketa dan penyerobotan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan ingin menguasai aset milik pemda. Temuan penelitian ini didukung oleh hasil penelitian dari Jamaludin (2017) yang mengatakan bahwa Manajemen aset melalui legal

audit tidak berpengaruh terhadap optimalisasi pemanfaatan aset. Sebaliknya tidak didukung oleh temuan penelitian Antoh (2017) yang mengatakan bahwa legal audit aset mempunyai pengaruh positif terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap.

2. Penilaian Aset (X3) berpengaruh signifikan terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset (Y)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 4 terlihat nilai koefisien yang tidak signifikan karena nilai probabilitas sebesar 0,825 lebih besar dari nilai alfa 0,05. Dengan demikian hipotesis empat yang menyatakan penilaian aset (X3) berpengaruh signifikan terhadap Optimalisasi pemanfaatan aset (Y) tidak terbukti kebenarannya atau ditolak.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penilaian terhadap barang milik daerah berupa aset tetap milik Pemda belum dilaksanakan secara maksimal dan tidak melaporkan aset yang tidak digunakan kepada Pemerintah Provinsi menyebabkan aset tanah menjadi tidak optimal. Sehingga Pemerintah harus lebih meningkatkan penilaian terhadap aset Pemda agar penggunaannya lebih optimal.

3. Pengawasan dan Pengendalian Aset (Z) berpengaruh Signifikan terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset (Y)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 5 terlihat nilai koefisien yang signifikan karena nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai alfa 0,05. Dengan demikian hipotesis lima yang menyatakan pengawasan dan pengendalian aset (Z) berpengaruh signifikan terhadap Optimalisasi pemanfaatan aset(Y) terbukti kebenarannya. Dengan demikian hipotesis 5 diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengasawan dan pengendalian aset sudah dilaksanakan dengan cukup baik sehingga dapat mengoptimalkan penggunaannya secara fisik aset maupun optimal secara ekonomi. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakuka oleh Sriastiti (2020), Jusmin & Nursalim (2018), dan Asman et al., (2016), yang mengatakan bahwa pengawasan dan pengendalian aset tidak berpengaruh terhadap mengoptimalkan pengelolaan aset tetap.

4. Inventarisasi Aset (X1) berpengaruh Signifikan terhadap Pengawasan dan Pengendalian Aset (Z)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis6 terlihat nilai koefisien yang signifikan karena nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai alfa 0,05. Dengan demikian hipotesis enam yang menyatakan inventarisasi aset (X11) berpengaruh signifikan terhadap pengawsan dan pengendalian aset (Z) terbukti kebenarannya. Dengan demikian hipotesis 6 diterima.

Hasil pengujian terdahulu menunjukkan bahwa invetarisasi aset dan pengamanan dan pemeliharaan aset berpengaruh positif tetapi pemanfaatan aset tidak memediasi hubungan positif antara invetarisasi aset optimalisasi pengelolaan aset.

5. Legal Audit Aset (X2) berpengaruh Signifikan terhadap Pengawasan dan Pengendalian Aset (Z)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 7 terlihat nilai koefisien yang signifikan karena nilai probabilitas sebesar 0,009 lebih kecil dari nilai alfa 0,05. Dengan demikian hipotesis tujuh yang menyatakan legal audit (X2) berpengaruh signifikan terhadap pengawsan dan pengendalian aset (Z) terbukti kebenarannya. Dengan demikian hipotesis 7 diterima.

Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan sampai pada tahap penghapusan aset. Dalam hal ini peran serta masyarakat dan DPRD serta auditor internal sangat penting. Keterlibatan auditor internal dalam proses [pengawasan](#) sangat penting untuk menilai konsistensi antara praktek yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan standar yang berlaku.

6. Penilaian Aset (X3) berpengaruh Signifikan terhadap Pengawasan dan pengendalian Aset Pemerintah Provinsi NTT (Z)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 8 terlihat nilai koefisien yang tidak signifikan karena nilai probabilitas sebesar 0,336 lebih besar dari nilai alfa 0,05. Dengan

demikian hipotesis 8 yang menyatakan penilaian aset (X3) berpengaruh signifikan terhadap pengawasan dan pengendalian aset ditolak.

Pengawasan merupakan usaha untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas, apakah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Pengendalian merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa Inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, serta Pengendalian dan pengawasan berpengaruh positif terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap di Pemerintah Kota Palembang (Hartati et al., 2019)

## KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini dijelaskan bahwa inventarisasi aset berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap, Legal audit aset berpengaruh signifikan terhadap Pengawasan dan pengendalian aset, Pengawasan dan pengendalian aset berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap, Pengawasan dan pengendalian dapat memediasi sempurna pengaruh Inventarisasi Aset, legal audit, dan penilaian aset terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset.

Sedangkan pada sebagian variabel menunjukkan tidak berpengaruh diantaranya: Legal Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap, Penilaian Aset tidak berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap, Penilaian aset berpengaruh tidak signifikan terhadap Pengawasan dan pengendalian, artinya semakin baik Penilaian aset tidak akan mampu meningkatkan Optimalisasi Penerimaan pemakaian kekayaan daerah.

## REFERENSI

- Asman, A., Akram, H. dan, & MT, A. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa. *Assets*, 6(1), 23–38.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH Di INDONESIA. *Law Reform*, 15(1), 149. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>
- Fanggidae, H. C., & Manafe, M. W. N. (2019). Evaluasi Anggaran Belanja Sebagai Alat Pengendalian Kebijakan Pembangunan Pada Pemerintah Daerah Expenditures Budget Evaluation: Control Tools for Development Policy on Local Government. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(2), 45–52.
- Hartati, S., Martini, R., & Winarko, H. (2019). Manajemen Aset Bagi Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap (Kajian pada Pemerintah Kota Palembang). *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, Vol 3(1), Hal 40-51. <https://jurnal.polsri.ac.id/index.php/jrtap/issue/view/318>
- Hair et al., (1998), *Multivariate Data Analysis*, Fifth Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River : New Jersey.
- Jusmin.(2013). Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Tingkat Optimalitas Aset Tetap (Tanah Dan Bangunan) Pemerintah Kota Baubau. *Jurnal Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Gadjah Mada*.
- Nunnally, Bernstein, I.H. 1994. *Psychometric Theory*, Edisi ke 3. New York : McGraw Hill.
- Nursalim, J. (2018). Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Tingkat Optimalitas Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) Pemerintah Kabupaten Sorong. *EQUILIBRIUM : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*, 6(2), 139. <https://doi.org/10.25273/equilibrium.v6i2.2933>
- Purba, R. (2019). Pengelolaan Aset Tetap Daerah Dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan aset

Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(2), 152–164.

Wicaksana, A., Harmono, H., & Yuniarti, S. (2021). Pengaruh inventarisasi aset, penggunaan aset, pengamanan dan pemeliharaan aset terhadap optimalisasi aset tetap tanah pada pemerintah Kabupaten Malang. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1–14. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v6i1.5514>